ANALISIS POTENSI TINDAK PIDANA PERSOALAN

KEWARGANEGARAAN BUPATI TERPILIH NTT

Nama : Muti'a Khaerani

Nim : 10200120221

Kelas : HTN-F

abstrak

Tindak pidana di bidang kewarganegaraan adalah hal yang cukup jarang terjadi di Indonesia. Salah satu dari tindak pidana yang jarang terjadi ini dilakukan oleh bupati terpilih NTT. Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Mahkamah mengingatkan syarat warga negara untuk dapat mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Indonesia menganut sistem (stelsel) kewarganegaraan tunggal, sehingga Warga Negara Indonesia tidak dibenarkan melekat status kewarganegaraan lain. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Seperti yang diketahui Kewarganegaraan sendiri adalah pengakuan suatu negara akan keterikatan individu dalam komunitas politik Indonesia

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Pidana, Bupati, Sabu Raijua, NTT.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient. (Kompas.com, 3 Februari 2021).

Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Dukcapil Kota Kupang. Dalam berita acara klarifikasi bersama dinyatakan

bahwa Orient telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997.

(Kompas.com, 4 Februari 2021).

Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi

I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan

pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat administrasi kependudukan yang saat ini sedang ditangani KPU, bawaslu dan Kementerian dalam negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah (Tribunnews.com, 5 Februari 2021).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang warga negara. Kewarganegaraan sendiri adalah pengakuan suatu negara akan keterikatan individu dalam komunitas politik Indonesia. Hal ini dimengerti secara universal sebagai hak bagi setiap orang yang disejajarkan dengan hak atas hidup dan kebebasan. Hubungan ini bukan hanya berpengaruh kepada suatu individu saja, namun juga kepada sekelompok masyarakat dan sosiokultural individu tersebut, atau secara luas berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia (Isharyanto, 2015 ; Mukhlis, 2012).

apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan.

Pada gambaran di atas perlu dikaji mengenai bentuk potensi tindak pidana di bidang kewarganegaraan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Bupati terpilih NTT dalam tindak kejahatannya dalam upaya memalsukan identitas aslinya.

Adanya masalah kewarganegaraan ganda terhadap bupati terpilih Orient, menarik untuk dibahas. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih di NTT ditinjau dari perspektif yuridis (UU Kewarganegaraan).

B. Permasalahan

Sesuai dengan pembahasan sebagaimana disebut di atas, berdasarkan gambaran tersebut perlu dikaji mengenai bentuk tindak pidana di bidang kewarganegaraan pada Bupati terpilih sabu rajua yang ternyata warga negara Amerika, bagaimana saja tindakan yang dilakukannya untuk mengelabui administrasi yang mencakup pemalsuan identitas - identitasnya. Serta bagaimana potensi pidana yang bisa menjerat bupati terpilih sabu rajua di bidang pelanggaran hukum kewarganegaraan ini.

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan kajian yang terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulisan jurnall ini berlandaskan pada hasil penelitian pada jurnal-jurnal, buku dan laman resmi yang menyangkut tentang penelitian atau kajian dalam ilmu hukum ini, dilakukan penulisan sebagai berikut:

- **Penelitian**
Penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui upaya studi pustaka untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kondisi objektif akar persoalan diberikannya tindak pidana di bidang kewarganegaraan oleh Bupati terpilih sabu rajua.
- **Teknik Pengumpulan Data**
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang dimana penulis akan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia, bentuk-bentuk tindak pidana dan alternatif penyelesaiannya. Akan dikaji pula studi pustaka berupa hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang telah membahas persoalan konflik atau tindak pidana di bidang yang sama.
- **Teknik Analisis Data**
Setelah memperoleh data - data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikan data dari sumber pustaka tersebut sesuai dengan pokok permasalahan hukum yang sedang diteliti, dengan menggunakan analisa kualitatif yang berarti data disajikan dengan bentuk uraian argumen yang disimpulkan secara deduktif oleh penulis.

D. Pembahasan

- **Tindak Pidana secara Umum**
Istilah tindak pidana merupakan istilah resmi dalam perundang – undangan. Hampir seluruh peraturan perundang – undangan menggunakan istilah tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana (Lamintang, 2002).

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu

perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan

Bersadarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

- Tindak Pidana Bupati Terpilih NTT

Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah yaitu individu tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun bisa dilihat bahwa calon bupati NTT Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kuwe melanggar ketentuan tersebut karena merupakan warga negara Amerika.

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) adalah:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah “keputusan termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Berdasarkan putusan sidang MA, setelah dianalisis keabsahan dan setelah diverifikasi, administrasi dokumen yang menjadi syarat calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang sampai dengan ini sah secara hukum dimana syarat utama penerbitannya adalah status kewarganegaraan haruslah warga negara Indonesia.

Kasus terpilihnya Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua seharusnya bisa terhindari bila Orient sejak awal mengakui statusnya. Aturan hukum di Indonesia pasalnya jelas hanya membolehkan Warga Negara Indonesia atau WNI sebagai kepala daerah.

Maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, yakni Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly. Pasangan tersebut dibatalkan atas kepesertaan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Ketua MK Anwar Usman, dalam membacakan amar putusan sidang sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua yang disiarkan MK secara daring. "Menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 16 Desember," kata Anwar Usman dikutip dari Antara, Kamis (15/4/2021).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Anwar Usman, juga mengabulkan sebagian permohonan pemohon, menyatakan batal keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal 23 September 2020.

Termasuk pula keputusan KPU setempat tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pilkada Sabu Raijua sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut dua, yakni Orient P Riwu Kore dan Thobias Uly. Selanjutnya majelis hakim juga menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua.

Tak hanya itu, MK juga memerintahkan pihak termohon dalam hal ini KPU Sabu Raijua melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3.

Sementara untuk waktu PSU harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim MK, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkannya ke MK.

Dalam amar putusan tersebut, MK juga memerintahkan KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelaksanaan amar putusan.

Majelis Hakim MK juga memerintahkan hal yang sama terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan amar putusan.

Selanjutnya memerintahkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Sabu Raijua melakukan pengamanan proses PSU. "Terakhir menolak permohonan pemohon untuk selain selebihnya," kata Anwar.

Untuk diketahui, Orient Riwu Kore memiliki kewarganegaraan ganda yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Paspor Amerika Serikat miliknya baru akan berakhir pada 2027.

Keberadaan Orient Riwu Kore yang menang di Pilkada Sabu Raijua kemudian memunculkan berbagai pro kontra. (Antara)

Pengamat politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jhon Tuba Helan, mengatakan Orient sejak awal harusnya menyadari statusnya yang masih sebagai warga negara AS. Seharusnya sebelum mengikuti pilkada, ia lebih dulu mengubah status kewarganegaraan nya.

Menurut Jhon yang juga dosen Hukum Tata Negara di Universitas Nusa Cendana Kupang menilai kesalahan pertama tentunya ada pada bupati terpilih yang tahu dan mau mendaftar ikut dalam pilkada di Sabu Raijua. Selain itu juga Jhon menilai bahwa kejadian yang terjadi di Sabu Raijua adalah juga bukti ketidaktepatan penyelenggara pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian meloloskan seorang warga negara AS masuk dalam pilkada di Sabu Raijua.

Namun, kemenangan dari bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Riwu Kore, bisa dibatalkan setelah ada konfirmasi resmi dari Kedubes AS bahwa yang bersangkutan adalah warga negara AS. “Menurut saya kemenangan dari yang bersangkutan bisa dibatalkan atau dianulir karena memang secara undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat,” katanya, Rabu (3/2)

Kasus ini mencuat setelah kemarin Kedubes AS mengirimkan surat konfirmasi ke Bawaslu kalau Orient merupakan warga negara AS. Jhon Tuba Helan mengatakan surat konfirmasi bisa menjadi dasar pembatalan kemenangan Orient.

Mekanisme pembatalan tersebut ada dan diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Bahkan setelah dilantik kepala daerah juga bisa dibatalkan, karena tidak bisa seorang kepala daerah adalah warga negara asing seperti diatur dalam undang-undang.

“Di UU Pilkada jelas disebut bahwa calon kepala daerah bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Jadi sudah jelas bahwa yang boleh menjadi kepala daerah adalah WNI,” tegasnya. Jhon juga menambahkan karena tidak memenuhi syarat sebagai karena statusnya WNA maka suara yang diperoleh artinya tidak memenuhi syarat.

Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yugi Tagi Huma, mengatakan sebenarnya dari awal kasus ini sudah diselidiki oleh mereka. Bawaslu bahkan sudah memperingatkan KPU Sabu Raijua.

Bawaslu juga sampai mengirimkan surat ke Kedubes AS untuk menanyakan kewarganegaraan dari Orient. Surat tersebut sudah dikirim sejak awal Januari namun baru dapat balasan dari Kedubes setelah adanya penetapan pemenang pilkada di Sabu Raijua. “Suratnya baru diterima kemarin dan langsung kami buka dan Kedubes mengonfirmasi yang bersangkutan masih berstatus warga AS,” tambah dia.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengusulkan beberapa alternatif solusi. Pertama, Orient bisa dikenakan sanksi pidana atas dugaan pelanggaran pemalsuan surat yang diatur Pasal 184 juncto Pasal 181 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

pelantikan calon kepala daerah terpilih dapat mengacu pada Pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menjelaskan sejumlah kondisi pelantikan calon terpilih, di antaranya calon terpilih tetap bisa dilantik meskipun sedang menjalani proses hukum.

Apabila sang calon terpilih berstatus sebagai terdakwa atau terpidana, maka calon itu tetap dilantik, tetapi langsung diberhentikan. Namun, Fritz mengatakan, kewenangan pelantikan berada di tangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena tahapan pemilihan sudah selesai setelah calon kepala daerah terpilih telah ditetapkan KPU.

“Tapi kan soal pelantikan, itu adalah kewenangan Mendagri karena sudah ditetapkan dan tidak ada sengketa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Fritz.

Fritz menambahkan, dalam UU Pilkada, tidak ada mekanisme khusus saat calon terpilih sudah tidak lagi memenuhi syarat. Berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 426 untuk konteks pemilihan legislatif, ada ketentuan pergantian bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat dan penetapan KPU akan batal demi hukum.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, ikut menjelaskan terkait isu kewarganegaraan Orient. Katanya, isu kewarganegaraan tersebut sudah sempat berhebus di awal penjurangan dan terdeteksi oleh Bappilu Partai Demokrat.

“Karenanya kami menindaklanjuti dan meminta klarifikasi kepada Jefri Riwo Kore yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT mengingat proses penjurangan yang kami lakukan secara berjenjang mulai dari DPC untuk Pilkada kabupaten/kota,” kata Kamhar kepada Republika.

Kamhar mengatakan pasangan calon Orient dan Thobias Uly diusung oleh koalisi lintas partai. Partai Demokrat menempatkan kadernya sendiri yaitu Thobias Uly sebagai Calon Wakil Bupati, sedangkan Orient merupakan kader PDIP yang ditempatkan sebagai calon bupati.

“Karena yang merupakan kader Partai Demokrat adalah Thobias Uly, tentunya kami lebih fokus pada pendalaman figur Cawabup, Orient Riwo Kore sendiri sebagai kader PDIP tentu menjadi ranah PDIP untuk melakukan pendalaman,” ujar nya.

Setelah mendapat penjelasan dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTT tentang prospek koalisi PDIP dan Partai Demokrat pada Pilkada Sabu Raijua termasuk penjelasan kewarganegaraan Orient yang tak ganda, Kamhar mengatakan Bappilu langsung mengajukan permohonan rekomendasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Menyikapi perkembangan terbaru tentang isu kewarganegaraan ini, Partai Demokrat menghormati dan patuh pada regulasi yang mengatur Pilkada. Tentunya dengan tetap memperhatikan hak-hak hukum dari yang bersangkutan,” ungkap nya.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) menindaklanjuti persoalan status Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P Riwo Kore. Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, serta pihak terkait lainnya.

“Sebagai tindak lanjut, Ditjen Otonomi Daerah akan melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi Republika, Rabu (3/2).

Ia mengatakan, koordinasi dilakukan guna menemukan alternatif solusi terhadap persoalan ini berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Menurut dia, Kemendagri pun sudah menyiapkan alternatif solusi tersebut dan akan ditawarkan serta dibahas bersama.

“Ada baiknya beberapa alternatif solusi atas permasalahan tersebut dibicarakan dulu, sehingga akan ditemukan penyelesaian yang lebih tepat,” kata Benni.

Ia menuturkan, untuk jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pun masih dalam tahap pembahasan. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Sabu Raijua, Orient dan pasangannya telah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih pada 23 Januari 2021.

KPU menganggap Orient memenuhi syarat karena mengantongi KTP elektronik sebagai bukti warga negara Indonesia (WNI). Keabsahan dokumen kependudukan ini sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang.

KPU pun sudah menyampaikan usulan pengangkatan kepala daerah terpilih kepada Mendagri melalui DPRD Sabu Raijua. Namun, pada awal Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua menerima surat balasan dari Kedutaan Amerika Serikat (AS) yang menginformasikan Orient adalah benar warga Amerika.

Sedang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menyarankan, Orient diperiksa polisi. Hal ini untuk membuktikan dugaan pelanggaran sistem kewarganegaraan olehnya.

“Saya berpandangan bahwa ybs (yang bersangkutan) perlu diperiksa oleh polisi untuk mendalami kewarganegaraannya dan dokumen identitas ybs saat mendaftar sebagai paslon. Nanti akan bisa dilihat ybs itu melakukan pelanggaran sistem hukum kewarganegaraan atau tidak,” ujar Zudan kepada wartawan, Selasa (2/2) malam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Namun, sejumlah negara menganut sistem kewarganegaraan ganda.

Menurut Zudan, adanya sejumlah negara dengan sistem kewarganegaraan ganda ini kemungkinan yang membuat WNI tidak melaporkan perpindahan kewarganegaraannya. Seperti halnya yang terjadi pada Orient kini.

Zudan mengatakan, sejak 1997, Orient sudah ada dalam database Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) WNI. Namun, untuk saat ini, Kemendagri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) guna mengecek apakah perpindahan WNI menjadi warga negara asing (WNA) itu sudah dilaporkan ke Dukcapil atau belum.

“Saya sedang koordinasi dengan Kemenkumham untuk cek WNI yang jadi WNA sudah dilaporkan ke Dukcapil belum perubahan status WNI ke WNA-nya,” tutur Zudan.

Dalam dokumen salinan hasil pindai, KTP-el atas nama Orient P Riwu Kore diterbitkan pada 9 Agustus 2020 oleh Dinas Dukcapil Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. KTP-el ini yang kemudian menjadi dokumen identitas yang dilampirkan Orient untuk mendaftarkan diri menjadi calon bupati Sabu Raijua pada September 2020 lalu.

KPU Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan klarifikasi ke Dinas Dukcapil Kota Kupang atas keabsahan KTP-el Orient. Dinas Dukcapil Kota Kupang menyatakan Orient P Riwukore adalah benar warga Kota Kupang yang beralamat sesuai KTP-el tersebut.

Kronologi Pengungkapan Kewarganegaraan Ganda Orient

Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient sebagai berikut: *Pertama*, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI dengan nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang (Kompas. com, 6 Februari 2021).

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan

Besar Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore (Berita Satu, 4 Februari 2021).

Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika berdasarkan kewenangan KPU.

Perspektif Yuridis dan Upaya Penyelesaian

Perspektif Yuridis dan Upaya Penyelesaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orangtua (Glery Lazuardy, 2020:44).

Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. UU Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan.

Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai (Kompas.com, 4 Februari 2021), penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Doli mengatakan, kejadian tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika

Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah: Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan karena Orient masih menjadi warga negara Amerika Serikat. Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya. Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia.

Gugur Sebagai Calon Terpilih Hingga Dipidana

Menanggapi persoalan ini, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa bila benar Orient memiliki dwi kewarganegaraan, maka kemenangan orient pada pilkada 2020 itu dapat digugurkan atau dibatalkan. Sebab status WNI merupakan salah satu syarat untuk dapat mengikuti kontestasi pilkada.

Indonesia tidak menganut sistem dwi kewarganegaraan. Pasal 23 huruf h UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (UU Kewarganegaraan RI) disebutkan WNI akan secara otomatis kehilangan hak kewarganegaraan Indonesianya jika memiliki kartu identitas resmi dari negara lain. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 10 No. Tahun 2016, seorang kepala daerah haruslah seorang yang menyanggah kewarganegaraan Indonesia.

“Kalau dia punya kewarganegaraan lain, otomatis status WNI gugur,” kata Titi saat dihubungi, Jum’at (5/2/2021).

Titi Anggraini juga menduga ada pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan Orient demi lolos dari persyaratan pencalonan. Jika dugaan itu benar, maka Bupati Sabu Raijua terpilih itu bisa dijerat pidana sesuai Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

“Dia (baca; Orient) bisa dikenakan Pasal 184. Sebab, bisa jadi dokumen kependudukannya itu dikeluarkan secara resmi oleh Dukcapil, tapi cara dia memperolehnya itu dengan cara yang tidak memenuhi syarat,” katanya.

Pasal 84 UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 dan paling banyak Rp72.000.000,00.”

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan kasus dugaan pelanggaran pilkada oleh Orient itu merupakan kasus pertama selama penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.

“Kami bertemu persoalan hukum yang belum pernah terjadi selama penyelenggaraan pilkada,” kata Fritz, dalam keterangannya di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis (4/2/2021) sebagaimana dilansir *Antara*.

Fritz menjelaskan alasan Bawaslu merekomendasikan penundaan pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua karena pihak-pihak penyelenggara pilkada masih mengembangkan pembahasan terkait dasar hukum yang dapat disangkakan kepada Riwu Kore.

Adapun terkait alternatif pembatalan keterpilihan Riwu Kore sebagai bupati terpilih Sabu Raijua, Fritz mengatakan ada tiga hal yang berkembang dalam diskusi.

Pertama, belum ada dasar hukum bagi kepala daerah, yang sudah ditetapkan sebagai pemenang pilkada, lalu dibatalkan keterpilihannya karena pelanggaran saat pendaftaran dan verifikasi berkas bakal calon yang sudah lewat.

Kedua, terkait dengan lembaga yang berwenang membatalkan penetapan keterpilihan calon bupati, apabila Riwu Kore terbukti memiliki dwi kewarganegaraan.

“Pertanyaan hukumnya adalah, apabila seorang calon yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan, lembaga mana yang berwenang untuk membatalkannya? Apakah Badan Pengawas Pemilu, KPU, atau Kementerian Dalam Negeri? Itu juga persoalan hukum yang harus kami lihat,” kata dia.

Ketiga, dalam kasus Pilkada Sabu Raijua itu muncul pembahasan terkait siapa yang akan dibatalkan, apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. “Lalu, kalau ada kemungkinan dibatalkan dan ada lembaga yang berwenang membatalkan, siapa yang dibatalkan? Apakah salah satu paslon atau kedua-duanya dapat dibatalkan?”

Seperti diketahui, Orient maju dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 bersama Thobias Uly sebagai calon bupati, dengan mendapat dukungan dari Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra. Riwu Kore-Uly memenangi Pilkada dengan perolehan suara 48,3 persen, mengalahkan pasangan Nikodemus N Rihi Heke-Yohanis Uly Kale dengan 30,1 persen suara dan pasangan Takem Irianto Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba dengan 21,6 persen suara.

- **Penyelesaian**

Terdapat pengajuan permohonan resmi pencabutan status kewarganegaraan Amerika yang bersangkutan kepada pemerintah Amerika Serikat pada bulan Agustus 2020 sebagai syarat pelepasan kewarganegaraan Amerika menurut hukum Amerika sebagaimana diatur Section 349 INA (8U.S.C. 1481) letter (a) point 5 maka Orient patriot Riwu Kore demi hukum telah hilang kewarganegaraan Amerikanya dan tetap sebagai warga negara Indonesia, atau berkewarganegaraan tunggal sebagai WNI.

E.Kesimpulan

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. Karenanya Orient harus melepaskan status Kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI. Untuk itu, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke

depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU Kewarganegaraan khusus nya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient.

F. Daftar Pustaka

Badilum mahkamah agung. "Pelanggaran kewarganegaraan". 2016. <https://bit.ly/3qEX65J> . Diakses pada 29 Juni 2021.

BPS: "Infografis provinsi NTT". 2010. <https://bit.ly/3dpjDxT> . Diakses pada 29 Juni 2021.

"Bupati Sabu Raijua Terpilih Ternyata WN AS, Ketua Komisi II DPR: Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupatisabu-raijua-terpilih-ternyatawn-as-ketua-komisi-ii-dprkecolongan>, diakses 13 Februari 2021.

"Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore Permintaan Maaf hingga Sorot Komisi I DPR", 5 Februari 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/terkini-polemik-bupati-sabu-raijua-orient-p-riwu-kore-permintaan-maaf-hingga-sorot-komisi-i-dpr>. Diakses 14 Februari 2021.

Glery Lazuardy. 2006. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif UndangUndang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, September 2020.

Hukumonline.com. 2021. "MK Batalkan Kemenangan Bupati Terpilih Sabu Raijua". <https://bit.ly/3hxx4Az> . Diakses pada 29 Juni 2021.

"Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA Orient Riwu Kore", 4 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkapterbongkarnya-status-wnaorient-riwu-kore>, diakses 12 Februari 2021.

Israharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. CV Absolute Media : Yogyakarta. Jabar.kemenhukham.go.id. 2015. "Pentingnya Status Kewarganegaraan dalam Memperoleh Kepastian Hukum". <https://bit.ly/3Ac11Lw> . Diakses pada 29 Juni 2021.

Mukhlis, R. 2012. *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. 4(1):203-204.

"Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-statuskewarganegaraan-gandabupati-sabu-raijua-terpilih?>, diakses 12 Februari 2021.

"Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspor AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraanbupati-sabu-raijua-berstatuswni-dan-punya-paspor-as?>, diakses 10 Februari 2021.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung : 2002, hal. 47. 7 ibid,hal 48.

Republik Indonesia. 2006. Undang - Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Ristekdikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*.

Tok! MK Batalkan Kemenangan Bupati Sabu Rajua Orient Riwu Kore.

<https://riau.suara.com/read/2021/04/15/164713/tok-mk-batalkan-kemenangan-bupati-sabu-raijua-orient-riwu-kore?page=2>. Diakses pada hari Kamis tanggal 15 April 2021

Voi.id. 2021. “Potensi pidana Bupati Terpilih Sabu Rajua yang Ternyata Warga AS”.

<https://bit.ly/3haaFG0> . Diakses pada 29 Juni 2021.